

RADIKALISME GERAKAN AL-IKHWAN AL-MUSLIMUN MESIR 1928-1948

Safrudin Edi Wibowo

Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

The wide spreading of violence is new phenomenon in Al-Ikhwān Al-Muslimūn movement in Egypt. Founded in 1928, this movement affirm that they would be committed to education as the only mean for realizing their ultimate goal. Unfortunately, with the development of socio-political situation in Egypt, this movement involved in political dispute, violence and terrorism. Stem from the aforementioned background, this research tries to study the roots of this violence, in term of socio-political background, ideological outlook and model of education within this movement.

Kata Kunci: Kekerasan dan al-Ikhwān al-Muslimūn.

Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan diyakini sebagai kebenaran tunggal, ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para penganutnya. Pada umumnya, orang-orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai *way of life*, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu 'masyarakat sipil'; sistem 'peradaban yang menyeluruh'; dan bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai 'agama dan negara'. Hakekat yang ada dibalik rumusan-rumusan semacam itu adalah pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekadar sistem ritus dan teologi. Lebih khusus lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal, dan sebaliknya Islam memberikan panduan etis bagi setiap aspek kehidupan. (Efendi, 2001: 7-8).

Sementara komunitas Islam percaya akan sifat holistik Islam yang seperti di atas, namun bagaimana hal tersebut diartikulasikan—sesuai

dengan watak ajaran Islam yang membolehkan adanya perbedaan pemahaman terhadapnya—sebenarnya merupakan sesuatu yang problematis. Kalangan yang disebut sebagai modernis muslim cenderung melihat totalitas Islam dalam dimensi yang lebih substantif, di mana isi daripada bentuk menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Di pihak lain, kalangan yang dicap sebagai kaum radikal cenderung untuk memahami sifat holistik Islam secara 'organik'. Dalam pengertian bahwa hubungan antara Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legalistik dan formalistik. (Mahendra, 1999: 29-30). Kegagalan untuk menerapkan Islam secara holistik ini telah mengilhami lahirnya berbagai gerakan revivalis Islam yang sering diidentikkan dengan gerakan radikal Islam. (Azra, 1996: 107).

Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn (selanjutnya disingkat al-Ikhwān) adalah salah

satu gerakan kebangkitan Islam terbesar abad 20 dan dipandang sebagai embrio gerakan-gerakan radikal kontemporer (Husaini, 1955). Didirikan oleh Hasan al-Bannâ—seorang guru di sebuah sekolah dasar Mesir—pada tahun 1928, gerakan ini merupakan reaksi terhadap situasi sosial kultural yang melanda Mesir. Al-Bannâ melihat adanya kesenjangan antara nilai-nilai Islam ideal dengan realitas kaum muslim saat itu. Telah terjadi pergeseran nilai dan ajaran Islam di kalangan umat, oleh karenanya umat harus dibangkitkan kembali melalui sebuah gerakan penyadaran yang terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Al-Ikhwan memilih dakwah dan pendidikan sebagai sarana untuk meraih kebangkitan yang dicita-citakan. Mereka yakin jika rakyat telah terdidik akan risalah Islam, maka Mesir akan menjadi negara Islam dengan sendirinya. (Armstrong, 2001: 349-450).

Dengan memposisikan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, gerakan Al-Ikhwan berkembang pesat sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Mesir dan negara-negara Arab sekitarnya dan menjadi kekuatan politik yang paling disegani. Perkembangan ini mengundang reaksi dalam skala internal maupun eksternal. Pihak kerajaan Mesir—yang mulai mencium maksud Al-Ikhwan untuk melakukan revolusi—dan imperialis Inggris—yang merasa terancam keberadaannya di wilayah Mesir bila gerakan ini berhasil menguasai kehidupan politik Mesir—berusaha melakukan tindakan-tindakan represif terhadap anggota gerakan ini. Sepanjang sejarah, pemerintah Mesir berkali-kali melakukan penangkapan, penahanan dan penyiksaan terhadap pimpinan maupun orang-orang penting Al-Ikhwan lainnya, membredel majalah dan koran Ikhwan, dan akhirnya memuncak pada pembubaran gerakan ini.

Tekanan-tekanan tersebut mengundang reaksi keras pengikut-pengikut militan Al-Ikhwan yang diekspresikan dalam bentuk aksi-aksi kekerasan sporadis terhadap kepentingan pemerintahan maupun asing. Aksi-aksi kekerasan dan teror tersebut berakibat pada

legalisasi negara untuk menangkap dan memenjarakan ribuan aktivis Al-Ikhwan dan secara sistematis mengurangi kekuatan dan bahkan melegalkan pembubaran gerakan tersebut. Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa meluasnya penggunaan kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan politis di kalangan Al-Ikhwan adalah fenomena baru dalam gerakan ini. Perkembangan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna melacak akar-akar kekerasan, baik ditinjau dari latar belakang sosial politik, sistem ideologi maupun model pendidikan yang menumbuhkan suburkan penggunaan aksi-aksi kekerasan dalam merealisasikan tujuan gerakan ini.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah akar-akar kekerasan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir sejak periode 1928, saat pertama kali gerakan ini dideklarasikan hingga dibubarkan pada tahun 1948. Periodisasi tersebut sengaja dipilih dengan pertimbangan bahwa rentang waktu 1928-1949 gerakan ini mengalami dinamika internal dan transformasi dari gerakan pendidikan dan sosial menuju gerakan politik. Di samping itu selama rentang waktu 1945-1949 merupakan tahun-tahun yang banyak diwarnai aksi-aksi kekerasan politik baik yang dilakukan Al-Ikhwan maupun kekuatan-kekuatan politik Mesir lainnya. Data-data mengenai subyek penelitian ini diperoleh dari data-data primer maupun data sekunder. Data primer dikoleksi melalui naskah dokumen-dokumen atau publikasi resmi baik berupa buku, jurnal ataupun publikasi lain yang dikeluarkan oleh gerakan Ikhwan. Data sekunder didapatkan dari buku-buku, makalah-makalah dan tesis serta laporan penelitian yang ditulis oleh orang-orang Al-Ikhwan maupun oleh penulis-penulis non-Ikhwan.

Penelitian ini memadukan pola penulisan sejarah dengan model penelusuran kronologis maupun tematis. Penelusuran kronologis dilakukan terutama untuk membidik perkembangan kondisi sosial politik dan

peranan Al-Ikhwan dalam percaturan politik Mesir selama 1928-1949. Penelusuran tematik dilakukan dalam kaitannya dengan perkembangan ideologi Ikhwan; strategi dan agenda perjuangan gerakan ini dalam mencapai tujuan idealnya.

Seluruh rangkaian pengumpulan data (*data collection*) menggunakan teknik dokumentasi, karena dalam studi ini, peneliti hanya melakukan pembacaan terhadap dokumen-dokumen baik primer maupun sekunder. Terhadap data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Politik Mesir 1928-1948.

Kondisi sosial politik pada tahun 1928-1948 diwarnai dengan berbagai aksi kekerasan politik yang melanda seluruh wilayah Mesir. Kekerasan politik tersebut pada hakekatnya bukan menjadi milik eksklusif gerakan Al-Ikhwan saja. Data-data sejarah menunjukkan bahwa Al-Ikhwan—sebagaimana rakyat Mesir lainnya—merasakan kekecewaan yang sama terhadap sistem hukum dan pranata sosial yang berlaku di Mesir, dan Al-Ikhwan menemukan alasan untuk melakukan kekerasan yang mempercepat berakhirnya kehidupan demokrasi parlementer di negara tersebut. Bedanya dengan kelompok lain, kekecewaan Al-Ikhwan terhadap proses politik lebih terekspresikan karena ia lebih efektif dalam mengekspresikan perasaan tersebut.

Dominasi dan intervensi Inggris terhadap persoalan dalam negeri menimbulkan kebencian yang mendalam dalam benak setiap rakyat Mesir. Untuk mengamankan posisinya, Inggris seringkali menekan penguasa Mesir baik raja maupun pemerintahan kabinet untuk melakukan tindakan yang melawan kehendak rakyat. Aksi-aksi represi pemerintah yang mengejawantah dalam pencekalan politik, penangkapan dan penahanan, penyiksaan dan pengekangan kebebasan terhadap gerakan nasional dalam menyalurkan aspirasinya

semakin memperburuk perkembangan sosial politik Mesir. Akibatnya, kebencian tidak hanya ditujukan kepada kolonialis Inggris, tetapi juga mengarah kepada istana dan pemerintahan kabinet Mesir. Rakyat

Perasaan dikhianati inilah yang mendorong pendekatan Al-Ikhwan—dan gerakan-gerakan lainnya di Mesir—terhadap penggunaan kekerasan sebagai sarana politik. Dalam nuansa seperti inilah kekerasan Al-Ikhwan memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh faksi-faksi politik lainnya: Dalam perlawanannya terhadap ‘pengkhianatan’ yang dilakukan pemimpin-pemimpin sekular Mesir, Al-Ikhwan melihat adanya pengkhianatan kultural, regijius dan politik; dalam tuntutananya terhadap ‘hak-hak demokratis’ menyisakan pertanyaan ‘siapa yang harus menentukan nasib bangsa dan tujuannya; dan dalam perlawanannya terhadap imperialisme Al-Ikhwan melihat adanya perlawanan terhadap ‘Neo-Salibisme’.

Kenyataan ini ditunjukkan dengan jelas dalam alasan penggunaan kekerasan oleh Ikhwan. Kekuatan para-militer Ikhwan—seperti dikatakan Husaini (1955: 97)—adalah jawaban atas ‘kegagalan politik’. Meskipun demikian, para anggota lebih melihat operasi para-militer sebagai ‘benteng pertahanan’ yang diperlukan organisasi dalam mewujudkan misinya, yang dibungkus dalam sebuah konsep militan tentang jihad. Mereka adalah ‘pasukan Islam yang akan menjaga risalah’. (Al-Banna, 1992: 91) Al-Bannâ memperingatkan pihak oposisi: ‘Jika kalian mengganggu dan menghadang di jalan risalah kami, Tuhan mengijinkan kami untuk membela jiwa kami.’

Sementara itu, motivasi religius dalam penggunaan aksi kekerasan memiliki implikasi lain yang lebih luas. Di samping melegalkan penggunaan kekerasan untuk membela ‘tujuan-tujuan abadi’, dalam diri orang-orang Al-Ikhwan berkembang pula perasaan paling benar sendiri dan arogansi yang melebarkan gap antar Al-Ikhwan dengan kelompok-kelompok lain di

Mesir. Kerja sama untuk tujuan-tujuan sementara memang pernah dilakukan, namun kerja sama ini mudah digagalkan karena adanya sikap tidak percaya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Al-Ikhwan hampir selalu berjalan sendirian dan bersikeras untuk melakukan aksi-aksinya secara sendirian.

Al-Bannâ sendiri telah menyusun pola untuk eksklusivitas kelompok dengan mengklasifikasikan rakyat Mesir berdasarkan sikap mereka terhadap Ikhwan. Ada empat macam kelompok orang, yaitu: orang yang percaya (*mu'min*); ragu-ragu (*mutaraddid*); oportunis (*nafa'i*); dan memusuhi (*mutahammil*). (Al-Banna, 1992: 14) Jika secara teoritis kategori ini memberi ruangan bagi orang Mesir untuk menjadi non-musuh, namun dalam prakteknya, ada garis batas di sekitar kategori 'mukmin', sehingga seseorang tidak cukup sekedar menjadi muslim semata, tetapi juga harus menjadi 'muslim anggota Ikhwan'. Konsekwensinya, pembagian struktur tatanan sosial ini menggerakkan arus sikap intoleran yang dingin dan kaku di dalam tubuh Al-Ikhwan yang mentransformasikan perselisihan politik keduniaan menjadi pertikaian sosial-religius. Baik lawan-lawan politik perorangan maupun kelompok menjadi sasaran kekerasan yang diilhami oleh eksklusivitas religius dan sosial dan tidak mungkin menerima kompromi dengan non-anggota Ikhwan.

Kekerasan sosial ini tidak hanya menimpa musuh-musuh politik semata, perasaan eksklusivisme kelompok juga melatari perpecahan internal yang tidak pernah padam dalam organisasi berkenaan prinsip-prinsip gerakan dalam menghadapi pembusukan moral masyarakat—apakah dengan upaya persuasif dan nasehat atau apakah memperbaikinya 'dengan kekuatan tangan'. Meskipun al-Bannâ memilih upaya persuasif sebagai kebijakan resmi Ikhwan, namun alternatif yang kedua tetap dilakukan dalam bentuk aksi-aksi sporadik anggota Al-Ikhwan atas inisiatif sendiri, yang

kemudian menjadi ancaman dan aksi-aksi terorisme yang mengatas nama Islam. Seruan al-Bannâ untuk melakukan reformasi moral—ditambah dengan 'rasa tanggung jawab untuk mengemban misi' yang ia tanamkan kepada para pengikutnya, dan rasa memiliki hak untuk melakukan reformasi moral, serta rasa memiliki kekuatan untuk aksi—tidak bisa tidak, ditanggapi oleh para pengikutnya dengan beberapa terma-terma kekerasan.

Ideologi al-Ikhwân al-Muslimûn

Setidaknya ada dua cara pandang Al-Ikhwan terhadap tatanan sosio-politik yang ada. *Pertama*, gerakan ini melihat dunia Islam mengalami kemunduran dan semakin jauh dari Islam ideal yang pernah diperkenalkan sejarah Islam awal. Kemunduran dan keterpurukkan dunia Islam menjadikan bangsa-bangsa Islam sebagai objek penjajahan dan penindasan kaum imperialis. *Kedua*, umat Islam mengalami kebobrokan ideologi yang sangat kronis; dan lebih memprihatinkan lagi, kebobrokan tersebut disebabkan tidak hanya oleh pemahaman yang salah dan peminggiran nilai-nilai Islam, tetapi juga karena nilai-nilai Islam diganti dengan nilai-nilai asing yang dibawa oleh penjajah, sementara itu tidak ada perlawanan yang cukup kuat dari para pemimpin politik, intelektual, dan agama di Mesir.

Untuk mengatasi problematika tersebut, Al-Ikhwan mencoba menawarkan solusi alternatif yang menurut mereka paling benar dan tepat, yaitu dengan kembali ke tatanan Islam. (Commins, 1955: 135) Dalam suratnya kepada Fârûq, al-Bannâ mengatakan bahwa Mesir berada di persimpangan jalan: *jalan Barat* dan *jalan Islam*. Al-Ikhwan berkeyakinan jalan Islamlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mereformasi bangsa. Peranan Mesir adalah unik, karena reformasi Mesir dimulai dengan Islam, maka regenerasi Islam harus dimulai dari Mesir, demi kelahiran Islam Internasional, dalam

makna ideologis dan historis, diperlukan sebuah *negara Islam yang kuat*. (Al-Banna, 1992: 274; 223)

Islam Perspektif al-Ikhwân al-Muslimûn

'Islamnya al-Ikhwân al-Muslimûn' adalah Islam yang khas. Ia bukan Islam yang baru (Al-Banna, 1992: 113;123), tetapi berbeda dengan Islam yang pernah ditafsirkan sejarah. Hukum dan ajaran Islam adalah utuh dan menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. Orang-orang yang berpikir bahwa ajaran-ajaran Islam hanya menyentuh aspek ibadah ritual saja dan tidak melingkupi aspek-aspek lain adalah salah. Islam adalah ideologi dan ibadah, pemerintahan dan umat, agama dan negara, spiritualitas dan perilaku, serta mushaf (teks) dan pedang. Al-Qur'an al-Karim mengandung ini semua dan meng-kategorikannya sebagai inti dan esensi *din al-Islâm*. (Al-Banna, 1992, 118-121)

Dengan keyakinan akan universalitas Islam, Al-Ikhwân memandang ideologi-ideologi lain (Barat) harus dilawan. Ideologi Barat adalah ujung tombak kerusakan, tirai yang menyembunyikan 'ketamakkan orang-orang yang loba dan impian para penjajah.' Tidak ada yang bisa menyelamatkan bangsa Arab dan kaum muslimin, dan tidak kehormatan bagi bangsa Timur kecuali jika mereka membebaskan diri mereka dari ideologi-ideologi tersebut dengan inisiatif dari dalam diri mereka sendiri. Kaum muslimin mampu melawan ideologi asing karena mereka tidak membutuhkannya. Ajaran Islam mencakup alternatif ideologi yang terbaik dari pada ideologi itu.

Sebelum kaum muslimin kembali kepada ruh yang menjadi inspirasi generasi Muslim awal (salaf), tidak akan ada keselamatan. 'Al-Qur'an al-Karim adalah kitab yang inklusif, di dalamnya Allah telah menghimpun dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar kebajikan sosial dan semua aturan-aturan keduniaan. Jika kaum muslimin menyimpang dari prinsip-prinsip ini: 'Misi kami

adalah mengembalikan—diri kami dan siapa saja yang mau ikut dengan kami—ke jalan yang benar. Ini adalah seruan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam dan bukan kembali—dalam arti literal—ke abad ketujuh; siapa yang beranggapan seperti ini, berarti ia tidak merencanakan 'awal sejarah Islam dengan sistem Islam itu sendiri. (Al-Banna, 1992: 18-19).

Ideologi Politik al-Ikhwân al-Muslimûn

Berangkat dari pandangan tentang Islam yang serba mencakup, Al-Ikhwân menjadikan penegakan *an-nizâm al-islâmî* sebagai tujuan tertinggi, dan penerapan syariah sebagai parameter bagi penegakan *an-nizâm al-islâmî* yang benar. (Mitchell, 1993: 235; Husaini, 1955: 79-80) Menurut al-Bannâ, reformasi yang sesungguhnya harus menyentuh politik. Keberagamaan semata tanpa komitmen yang kuat terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi adalah sikap masyarakat jahiliyyah. (Al-Banna, 1992: 101-104) Pembangunan masyarakat utama tidak akan terwujud tanpa eksistensi negara Islam. Tidak ada masyarakat yang bisa mengatur urusannya secara islami tanpa sebuah pemerintahan Islam. (Al-Banna, 1992: 317)

Prototipe terbaik sebuah sistem politik Islam menurut Al-Ikhwân adalah sistem politik Islam masa Rasulullah dan Khulafâ' ar-Râsyidûn. Persatuan (*wahdah*) menjadi tulang punggung sistem sosial Qur'ani dan menjelma dalam kehidupan yang sehari-hari. Persatuan sosial dapat diraih dengan al-Qur'an dan bahasanya; persatuan politik diwujudkan di bawah kepemimpinan khalifah dengan satu arah ideologis; meskipun terdapat berbagai wilayah pemerintahan. (Al-Banna, 1992: 95-96)

Bentuk Negara Islam

Dalam pandangan Al-Ikhwân, syariah merupakan karakteristik tatanan islami (*an-nizâm al-islâmî*) yang paling utama, dan dalam tatanan Islami seperti itu akan berdiri sebuah negara Islam. Menurut al-Bannâ, pemerintahan

negara hanya merupakan pelaksana hukum-hukum syariah, bukan legislatornya. (Mousalli, 1993: 168) Di luar keharusan penerapan syariah, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari ideolog Al-Ikhwan mengenai bentuk sebuah negara Islam sejati. Hal tersebut dikarenakan keinginan orang-orang Al-Ikhwan untuk menghindari konfrontasi dengan pemerintahan Mesir. (Commins, 1955: 138) Di samping itu, sejarah Islam tidak banyak meninggalkan warisan teori-teori politik Islam. Menurut Qutb, realitas sejarah menunjukkan figuritas yang gagal dalam kehidupan politik Islam. Hal itu terjadi karena singkatnya periode kekhalifahan ortodoks (*ar-râsyidûn*) sebagai sumber teladan yang disepakati, sehingga para teoritis politik Islam terpaksa menekankan pada 'prinsip-prinsip umum' yang akan memberi *tuntunan* sebuah negara Islam; hal-hal yang spesifik dikembalikan kepada waktu, tempat dan kebutuhan rakyat. (Qutb, 171)

Struktur organisasi politik negara Islam menurut Al-Ikhwan dibangun di atas tiga prinsip dasar: (1) al-Qur'an menjadi Undang-Undang Dasar yang paling fundamental; (2) pemerintahan yang menjalankan kewajibannya menurut asas musyawarah (syura); (3) penguasa eksekutif menjalankan pemerintahannya atas dasar ajaran Islam dan kehendak rakyat. Dengan tiga prinsip dasar ini, negara Islam akan memiliki pemerintahan yang adil dan mampu mengamankan kesejahteraan umum. Detail-detail organisasi negara Islam berangkat dari tiga prinsip dasar ini. (Al-Banna, 1992:8; 358-9; 366)

Karena syariah tidak menjelaskan bentuk sebuah dan struktur pemerintahan negara Islam, maka terdapat beberapa alternatif model negara Islam tergantung pada konteks sosial dan kondisi temporal setiap negara Islam. Satu-satunya prasyarat sebuah negara Islam adalah bahwa negara tersebut dalam berbagai bentuknya harus mentaati prinsip-prinsip dan semangat syariah Islam. (Taji-Farouki, 36) Oleh karena itu, nama yang diberikan kepada

eksekutif dalam negara Islam menjadi tidak penting. Khalifah, imam, raja, hakim—gelar-gelar ini dan gelar-gelar lainnya yang dipergunakan dalam al-Qur'an semua bisa diterima, karena gagasan tentang 'penguasa' secara prinsip kembali kepada gagasan tentang 'kepemimpinan' (*ri'âsah*) dalam makna umum dan tidak mengindikasikan sistem tertentu pemerintahan. Bila ia (penguasa) memerintah dengan ketaatan kepada perintah Allah dan menghormati batas-batas yang diberikan kepadanya oleh konsep syura, gelar yang diberikan kepadanya menjadi tidak penting; tanpa syarat-syarat ini, apapun gelar yang diberikan Islam kepada seorang pemimpin, sistem itu menjadi tidak islami. (Al-Banna, 1992, 213; Ruslan, 240)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Islam perspektif Al-Ikhwan adalah negara yang khas; ia bukan negara teokrasi karena otoritas penguasa bersumber dari rakyat bukan Tuhan; bukan pula negara diktator karena penguasa boleh diturunkan jika ia melanggar kontrak yang telah disepakati; dan bukan pula negara monarkhi karena penguasa tidak memiliki otoritas yang bisa diwariskan. Negara tersebut harus mampu merealisasikan nilai-nilai tertinggi Islam dan mematuhi prinsip-prinsip umumnya. Nilai-nilai tersebut diadopsi dari al-Qur'an dan Sunnah dan sudah menjadi nilai-nilai yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Negara tersebut juga harus merepresentasikan tujuan tertinggi (*maqâsid*) syariah.

Pendidikan Dan Indoktrinasi

Keberhasilan Al-Ikhwan dalam merekrut anggota kemudian ditindaklanjuti dengan program-program pendidikan dan indoktrinasi politis maupun ideologis. Gerakan ini meyakini bahwa pendidikan merupakan pendahuluan yang niscaya bagi terwujudnya cita-cita tertinggi Al-Ikhwan yaitu mendirikan negara Islam. Upaya untuk mengganti tatanan

sosial politik yang ada dengan tatanan islami tidak akan berhasil tanpa membangun terlebih dahulu masyarakatnya. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya negara Islam, harus ada rentang waktu agar Al-Ikhwan dapat mensosialisasikan prinsip-prinsipnya. Peran utama Al-Ikhwan adalah mendidik umat akan kebenaran; dan bila umat telah diislamkan, maka sebuah negara Islam yang sesungguhnya akan terbentuk dengan sendirinya. (Armstrong, 2001: 350). Berangkat dari paradigma ini, Al-Ikhwan menjadikan pendidikan sebagai platform utama gerakan dalam menyebarkan misi-misinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Al-Ikhwan mencanangkan program-program pendidikan dan indoktrinasi baik dalam level individu, keluarga maupun masyarakat. Di antara program-program ini yang paling penting adalah sistem usrah (*nizâm al-usar*), sistem batalion (*katibah*), kepanduan (*jawwâlah*); dan—dalam batas-batas tertentu—biro rahasia (*an-nizâm al-khâsh* atau *al-jihâz as-sirrî*). (Mahmûd, 1990; 1991; Mitchell, 1993: 195-208)

Seksi usrah dan kepanduan merupakan dua institusi penting bagi anggota organisasi dan indoktrinasi; kedua seksi ini merekrut anggota-anggotanya secara terbuka dan menjadi pondasi dasar bagi bangunan kekuatan Al-Ikhwan. Peranan yang tidak terlalu penting—tetapi lebih dramatis—yang berkaitan dengan masalah indoktrinasi dan kekuatan adalah pasukan khusus (*an-Nizhâm al-Khâs*) atau biro rahasia (*al-jihâz as-sirrî*). Meskipun biro rahasia Al-Ikhwan bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan yang dituduhkan kepada organisasi ini dan menyebabkan kekacauan dalam tubuh gerakan ini, namun biro rahasia memiliki mata rantai yang lebih kuat, disiplin tinggi, dan koordinasi yang solid antar anggota. Fungsi penting biro rahasia Al-Ikhwan adalah bahwa biro ini secara logis mengakar pada dan didukung oleh 'etos jihad' dalam pelatihan yang diselenggarakan Al-Ikhwan secara umum.

Anggota yang terpilih ditraining dengan berbagai program pelatihan. Menurut Mitchell (1993), para anggota digembleng dengan pelatihan militer guna melaksanakan tugas espionase dan aksi-aksi kekerasan. Seperangkat aturan, simbol, dan perangkat-perangkat yang sesuai dengan watak kerahasiaannya dirumuskan. Para anggota juga ditraining dengan materi-materi agama, sejarah dan hukum dan pelatihan fisik seperti PPPK, komunikasi dan transportasi, penggunaan senjata dan pelatihan militer. Setelah mencapai level tertentu, seorang anggota dimasukan ke dalam ruangan khusus untuk mengikrarkan sumpah (*baiat*) di bawah al-Qur'an dan pistol untuk senantiasa taat dan menjaga kerahasiaan biro rahasia.

Program pendidikan dan indoktrinasi Al-Ikhwan secara umum melakukan penekanan yang berlebihan kepada pendidikan fisik dan militeristik. Orientasi tersebut kemudian dikombinasikan dengan ideologi militansi dan jihad yang dijadikan nilai sentral dalam etos pendidikan Al-Ikhwan. Tulisan-tulisan dan pidato Al-Ikhwan selalu diwarnai dengan rujukan-rujukan yang mendukung nilai-nilai tersebut beserta tujuan-tujuannya dalam terma-terma militer. Al-Bannâ berkali-kali mendoktrin anggotanya bahwa mereka adalah tentara pembebas; di atas pundak kalian terpikul pesan-pesan pembebasan; kalian adalah batalion penyelamat untuk bangsa ini yang sedang ditimpa malapetaka. Mereka adalah tentara Allah yang bersenjatakan moralitas Islam. (Al-Bannâ, 1992: 419; 31-32)

Ilustrasi paling spesifik tentang kualitas sikap militan Al-Ikhwan bisa ditemukan dalam penggunaan konsep jihad. Meskipun para anggota seringkali didoktrin bahwa jihad merupakan varian dari kata *ijtihad* yang mempunyai konotasi 'upaya intelektual', namun terma tersebut lebih sering menunjukkan makna perang (*qitâl*), bahkan bila sampai mati dan meraih *syahâdah* (martyrdom). Kematian, sebagai titik akhir

dari jihad, dipuji oleh al-Bannâ dengan slogan-slogan: "Seni kematian (*fann al-maut*), kematian adalah seni (*al-maut fann*).\" Kemenangan hanya akan diperoleh dengan menguasai seni kematian (*fann al-maut*). (Al-Bannâ, Majmû'ah: 361) Al-Bannâ pernah memperingatkan pengikut-pengikutnya: 'barang siapa meninggal dunia dan tidak pernah ikut berperang dan tidak punya tekad untuk berperang, ia akan mati dalam keadaan jahiliyyah.' Gerakan ini tidak akan sukses, tegas al-Bannâ, tanpa adanya pengabdian dan jihad total.

Dalam sistem usrah, bersama-sama dengan kajian-kajian teoritis tentang jihad, pelajaran sejarah untuk para siswa juga mengkaji kemenangan-kemenangan perang dalam penaklukan Islam pada masa awal Islam. Sistem ini juga mencakup seksi penting lain yaitu seksi legislasi perang (*masyrû'iyat al-qitâl*); substansi pelajaran-pelajaran ini merupakan tuntutan terhadap kaum muslimin untuk melawan gagasan dan nilai-nilai untuk mengusir pendudukan non-muslim dan anti-muslim atas mereka. Senada dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam perayaan hari besar Islam adalah para anggota berusaha mengkoleksi sebanyak-banyaknya peristiwa-peristiwa perang terkenal dalam sejarah Islam. Lebih penting lagi adalah perayaan tahunan untuk memperingati perang Badar, di mana dalam perayaan tersebut para pembicara mengobarkan semangat jihad. Perang Badar dan arti pentingnya bagi kaum muslim menjadi tema dalam beberapa pentas teater yang dimainkan oleh anggota Al-Ikhwan dan ditonton oleh anggota Al-Ikhwan lainnya.

Konsep jihad yang militan dan seni kematian mewarnai penekanan pendidikan Al-Ikhwan mendorong para anggota untuk meraih kematian. Dengan berperang dan mati atas nama Islam di Zona Terusan, Palestina, atau di tiang gantungan Mesir, seorang Al-Ikhwan meyakini bahwa kematiannya akan mengantarkan mereka ke

dalam derajat pahlawan Islam. Dalam semangat ini seorang Al-Ikhwan dengan tenang memandang mati syahid sebagai 'jalan paling singkat dan mudah menuju kebahagiaan hidup di akhirat.' Semangat seperti inilah yang ditakuti oleh orang-orang Mesir baik muslim maupun non-muslim, dan—semangat jihad plus aktivisme Al-Ikhwan dalam politik inilah—yang tidak bisa ditolerir oleh semua jenis pemerintahan Mesir.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari analisis bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Aksi-aksi kekerasan Al-Ikhwan merupakan respon terhadap situasi sosial-politik Mesir dan memiliki kemiripan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Mesir lainnya. Perbedaannya terletak pada dimensi keislaman yang diklaim Al-Ikhwan sebagai milik mereka, dan yang menimbulkan berbagai kekerasan baik dalam kehidupan politik maupun sosial yang ditandai dengan sikap intoleran yang kaku. Keyakinan religio-politik yang dianut oleh Ikhwan, di samping melegalkan penggunaan kekerasan untuk membela 'tujuan-tujuan ideal', juga menumbuhkan perasaan paling benar sendiri dan arogansi yang melebarkan jarak antar mereka dengan kelompok-kelompok lain di Mesir. Sikap intoleran yang dingin dan kaku di kalangan anggota Al-Ikhwan mentransformasikan perselisihan politik keduniaan menjadi pertikaian sosial-religius. Baik lawan-lawan politik perorangan maupun kelompok menjadi sasaran kekerasan yang diilhami oleh eksklusivitas religius ini.
2. Pandangan ideologis Al-Ikhwan diwarnai dengan sikap penolakan terhadap tatanan sosial politik Mesir. Mereka menganggap bahwa dunia Islam telah mengalami kemunduran dan semakin jauh dari Islam

ideal yang pernah diperkenalkan oleh generasi Islam awal. Umat Islam mengalami kebobrokan akidah yang sangat kronis; yang disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap nilai-nilai Islam dan penggantian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai asing yang disebarkan penjajah. Untuk mengatasi problematika tersebut, al-Ikhwân al-Muslimûn menawarkan solusi alternatif yang paling benar dan tepat, yaitu kembali ke tatanan Islam. Islam dalam pandangan Al-Ikhwan adalah sistem yang menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. Berangkat konsepsi ini, Al-Ikhwan menjadikan penegakan *an-nizâm al-islâmî* sebagai tujuan tertingginya. Penerapan syariah menjadi parameter bagi sebuah penegakan *an-nizâm al-islâmî* atau negara Islam yang benar. Yaitu sebuah negara yang khas; bukan negara teokrasi karena otoritas penguasa bersumber dari rakyat bukan Tuhan; bukan pula negara tiran karena penguasa boleh diganti jika melanggar kontrak yang telah disepakati; dan bukan negara monarkhi karena penguasa tidak memiliki otoritas turun temurun.

3. Program-program pendidikan dan indoktrinasi Al-Ikhwan turut berperan penting dalam mensosialisasikan ideologi radikal kepada para anggotanya. Di samping itu, penekanan yang berlebih kepada pendidikan fisik dan militer dibanding dengan pendidikan intelektual, juga doktrin-doktrin tentang jihad dan pengorbanan yang lebih mendominasi pendidikan intelektual Ikhwan, mempertegas kesimpulan di atas.

Rekomendasi

1. Gerakan al-Ikhwân al-Muslimûn adalah produk dari sejarah yang melingkupinya. Kekerasan yang dilekatkan kepada Al-Ikhwan hanyalah sebagian potret Al-Ikhwan yang tidak mewakili mainstream gerakan, bahkan kekerasan itu sendiri dikutuk oleh

pemimpin dan mayoritas pengikut gerakan ini. Oleh karena itu, adalah sikap yang bijak bila kita menyikapi kekerasan itu dengan mencoba memahami proses-proses sosial politik yang melatarinya. Meminjam istilah Bassam Tibi, kedamaian bisa diciptakan apabila sebab-sebab yang menumbuhkan aksi-aksi kekerasan itu diminimalisir dan bukan ditumbuhkan dengan kontra-kekerasan.

2. Islam adalah agama yang *open-minded*, bukan ideologi politik yang intoleran. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan untuk memaksakan keyakinan agama tidak dibenarkan dalam Islam. Penggunaan kekerasan diperbolehkan untuk melawan agresor asing yang menindas bangsa; namun bila kekerasan tersebut digunakan untuk menyerang orang-orang yang tidak sepaham atau tidak sekelompok dengan mereka, jelas sangat dikutuk oleh agama.
3. Sejarah menunjukkan bahwa ketika Al-Ikhwan berjuang menggarap wilayah kultural melalui gerakan dakwah, sosial dan pendidikan, gerakan ini mampu berkembang menjadi gerakan massa yang besar. Jika gerakan Al-Ikhwan tetap konsisten dalam wilayah kultural, niscaya sebuah negara Islam yang mereka cita-citakan bisa terwujud, tanpa melalui cara-cara kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Halîm, Mahmûd, 1979, *Al-Ikhwân al-Muslimûn: Ahdâs Sana'at at-Târikh*, Kairo: Dâr ad-Da'wah.

Al-Bannâ, Hasan, 1992, *Majmû'ah Rasâil Hasan Al-Bannâ*, Kairo: Dâr at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islâmî.

———, 1979, *Muyakkarât ad-Da'wah wa ad-Dâ'iyah*, Kairo: al-Maktab al-Islâmî.

- Armstrong, Karen, 2001, *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono dkk, Jakarta: Kerja sama Serambi dengan Mizan
- Azra, Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramdina.
- Commings, David, 1995, "Hasan al-Bannâ (1906-1949)", dalam Rahmena, Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan.
- Efendi, Bahtiar, 2001, *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press.
- Ghânim, Ibrâhîm al-Bayûmî, 1992, *Al-Fikr as-Siyâsî li al-Imâm al-Bannâ*, (kairo: Dâr at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islâmiyyah.
- Husaini, Ishak Musa, 1955, *The Moslem Brethren: The Greatest of Modern Islamic Movements*, Beirut: Khayat's Colege Book Cooperative.
- Kepel, Gilles, 1997, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi di Dunia Modern*, terj. Masdar Hilmy, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lapidus, Ira M., 1999, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1999, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina.
- Mahmûd, 'Alî 'Abd al-Halîm, 1990, *Wasâil at-Tarbiyyah 'Ind al-Ikhwân al-Muslimîn*, (Kairo: Dâr al-Wafâ' li at-Tibâ'ah wa at-Tauzî'.
- , 1991, *Manhaj at-Tarbiyyah 'Ind al-Ikhwân al-Muslimîn*. Al-Mansurh: Dar al-Wafâ' Li at-Thiba'ah waat-Tauzi'.
- Marty, Martin E. & R. Scott Appleby (Eds.), 1993, *Fundamentalism Comprehended*, Chicago: University of Chicago Press.
- , 1993, *Fundamentalism Observed* (Chicago: University of Chicago Press.
- Mitchell, Richard P., 1993, *The Society of Muslim Brothers*, (Oxford, Oxford University Press.
- Mousalli, Ahmad S., 1993, *Hasan al-Bannâ's Islamist Discourse on Constitutional Rule and Islamic State*, Journal of Islamic Studies 4-2
- Qutb, Sayyid, t.th. *Al-'Adâlah al-Itimâ'iyah fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Kâtib al-'Arabî.
- , 1983, *Ma'rakah al-Islâm wa ar-Ra'sumâliyyah*, (Kairo: Dâr asy-Syurûq.
- Ruslân, 'Usmân 'Abd Mu'izz, t:th., *At-Tarbiyah as-Siyâsiyah 'Ind al-Ikhwân al-Muslimîn*, (Kairo: Dâr at-Tauzî' wa an-Nasyr al-Islâmiyyah.
- Tibi, Bassam, 2000, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Welch, Alford T. dan Pierra Cachia (eds.), 1979, *Islam: Past Influence and Present Challenge* (Edinburg: Edinburg University.